



**Jurnal Riset Terapan Akuntansi
Politeknik Negeri Sriwijaya**



PENGARAH
Aladin

KETUA DEWAN REDAKSI
Evada Dewata

WAKIL KETUA DEWAN REDAKSI
Lambok Vera Riama Pangaribuan

ANGGOTA DEWAN REDAKSI
Yuliana Sari
Faridah
Muhammad Husni Mubarak
Sri Hartaty
Yevi Dwitayanti
Maulan Irwadi
Citra Dewi Sartika

MITRA BASTARI

Rita Martini **Lukluk Fuadah**
Politeknik Negeri Sriwijaya *Universitas Sriwijaya*

Memed Sueb **Agus Widarsono**
Universitas Padjajaran *Universitas Pendidikan Indonesia*

Nuzulul Hidayat **M. Iqbal A.**
Universitas Persada Indonesia *Universitas Tadulako, Palu*

Wing Wahyu Winarno
STMIK Amikom

PUBLIKASI

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

EDITORIAL

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Ext. 1048 Fax. 0711-355918
Website: jurnal.polsri.ac.id Email: jrtap@polsri.ac.id

**Jurnal Riset Terapan Akuntansi
Politeknik Negeri Sriwijaya**

Volume 3, Nomor 1 Januari 2019

ISSN : 2579-969X

DAFTAR ISI

Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk Pengamanan Barang Milik Daerah. (Choiruddin, Zulkifli, Hadi Winarko, dan Rita Martini)	1-10
Pengaruh Penalaran Logis terhadap Kemampuan Membuat Keputusan dalam Proses Audit (Lisa Martiah Nila Puspita, dan Sara Andriani)	11-21
Eksplorasi Keterampilan Komunikasi yang Dibutuhkan Pasar Kerja Bidang Akuntansi (Luh Mei Wahyuni, I Ketut Suwintana, dan I G A Oka Sudiadnyani)	22-30
Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kualitas Audit pada Auditor BPKP (Nila Aprila, Indah Oktari Wijayanti dan Ria Marantika)	31-39
Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang) (Sukmini Hartati, Rita Martini, dan Hadi Winarko)	40-51
Penyusunan Sak EMKM pada Sentra Mebel Antang (Sukriah Natsir, Anna Sutrisna Sukirman, dan Andi Gunawan)	52-58
Pengaruh Pengumuman Kebijakan Dividen terhadap Volatilitas Harga Saham (Yani Riyani, dan Susan Andriana)	59-67
Determinan <i>Fiscal Stress</i> Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Yevi Dwitayanti Nurhasanah, dan Rosy Armaini)	68-78
Kebijakan Editorial	79-80
Ketentuan Penulisan Naskah JRTA	81-82

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya Jurnal Riset Terapan Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya ini dapat diterbitkan.

Jurnal Riset Terapan Akuntansi (JRТА) adalah jurnal untuk mengembangkan kajian manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi dan memberikan sarana bagi publikasi hasil kajian empiris berkaitan dengan interaksi antara manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Jurnal ini diharapkan dapat mendorong munculnya analisis kritis dan empiris atas kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi. Analisis dapat bersifat internasional, nasional atau organisasi dengan menggunakan persektif tunggal, maupun *multiple*.

Jurnal Riset Terapan Akuntansi terbit 2 kali dalam setahun yaitu edisi Januari dan Juli. Naskah dapat dikirimkan ke alamat Redaksi.

PUBLIKASI

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

EDITORIAL

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Ext. 1048 Fax. 0711-355918
Website: jurnal.polsri.ac.id Email: jrtap@polsri.ac.id

MANAJEMEN ASET BAGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang)

Sukmini Hartati¹⁾, Rita Martini^{2)*}, Hadi Winarko³⁾

¹⁾ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya; email: sukmini_hartati@polsri.ac.id

²⁾ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya; email: *ritamartini@polsri.ac.id

³⁾ UMPK, Politeknik Negeri Sriwijaya

Abstract

This study aims to determine the effect of inventory assets, legal audit, asset rating, control and supervision of assets to optimize management of property assets local government in Palembang. The population of this research are some OPD in Palembang. Sample selection using purposive sampling method. The sample used in this study were 48 respondents. The analysis tool used is multiple linear regression. The result of hypothesis testing shows that asset inventory, legal audit, asset assessment, control and asset control have a positive and significant impact on optimization of fixed asset management. The simultaneous test shows the result that asset inventory, legal audit, asset assessment, asset control and supervision variables simultaneously affect the optimization of fixed assets management.

Keywords: *Asset inventory, legal audit, asset rating, asset control and supervision, optimization of fixed property management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di kota Palembang. Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada OPD dalam lingkup pemerintah kota Palembang. Data yang digunakan data primer. Teknik pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Secara parsial inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di pemerintah Kota Palembang. Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh secara bersama-sama terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di pemerintah Kota Palembang.

Kata Kunci: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengendalian dan pengawasan aset, optimalisasi pengelolaan aset tetap

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk aspek pendanaan pembangunan daerah. Salah satu kriteria mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan di bidang keuangan. Kemampuan mengelola keuangan berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Kewenangan yang diberikan berkaitan juga dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan aset yang baik. Aset dapat diartikan

sebagai barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau yang digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki/dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda.

Aset (Republik Indonesia, 2010) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang serta persediaan, adapun aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, serta dengan adanya pembaharuan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah membawa perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah. Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dapat dinilai dengan uang tidak hanyamencakup hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik berupa barang maupun uang. Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa posisi aset pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset (Sangadji, 2018). Inventarisasi aset sangat penting di dalam siklus pengelolaan aset. Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna, sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah, aset dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah apabila aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan daerah. Pengelolaan aset daerah yang optimal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila aset daerah tidak terkelola dengan baik akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding

dengan keuntungan/manfaat yang dapat dihasilkannya.

Pemerintah daerah harus memahami apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya aset tetap tanah dan bangunan. Dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset dan barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Siregar, 2004), ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan pengelolaan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dimana jika keempat tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparansi.

Laporan Keuangan pemerintah daerah kota Palembang mendapat opini WTP 8 tahun secara berturut-turut. Namun, masih terdapat kelemahan atas LKPD yang berhasil ditemukan pada Hasil Pemeriksaan Keuangan (HPK) BPK RI tahun 2016 yaitu pengelolaan aset tetap pemerintah Kota Palembang belum dilaksanakan secara optimal. Hasil pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016) mengungkapkan terdapat perubahan sistem pengelolaan aset tetap. Sebelumnya pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual, berubah menjadi pencatatan dan pelaporan berbasis sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD. Hal ini mengakibatkan tidak terdapat verifikasi secara lengkap atas data yang diinput ke dalam aplikasi SIMDA BMD. Kemudian penyajian aset tetap yang memiliki nilai Rp 0,00, tidak memiliki informasi bukti kepemilikan, dan informasi lokasi aset tetap tersebut.

Pemerintah kota (Pemkot) Palembang melakukan data ulang terhadap aset yang dimiliki, termasuk administrasi surat tanah yang belum ditingkatkan status kepemilikannya. Pemkot perlu juga memperbarui nilai aset, dan *diupdate* waktunya. Beberapa aset yang tidak memiliki sertifikat yang jelas. Berkaitan dengan kepemilikan, beberapa aset yang dibeli dari pihak ketiga belum dibaliknamakan (Fahmi, 2015).

Permasalahan lain terkait pengelolaan aset yang belum optimal, terungkap pada catatan atas laporan keuangan (CaLK) Pemkot Palembang

pada tahun 2017. Terdapat aset Penyerahan, Personil, Sarana dan Prasarana Dokumen (P3D) yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan, namun masih tercatat di Neraca 31 Desember 2016, karena belum terdapat proses verifikasi data oleh BPKAD kota Palembang maupun pihak Pemprov Sumatera Selatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan kasus tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Tena Kerja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial.

Fenomena sehubungan dengan manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian aset, serta optimalisasi pengelolaan. Ini mengindikasikan pengelolaan aset tetap pada Pemkot Palembang masih belum dilaksanakan secara optimal. Manajemen aset mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Mantoyob, Ratang, & Kambu, 2016), (Asman, Akram, & Alamsyah, 2016), dan (Pratama & Pangayow, 2016). Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di kota Palembang

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen (Malaya Hasibuan, 2006:2) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen (Tarnujaya dan Shirly, 2006) adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Aset atau *property* (Republik Indonesia, 2005), adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Konsep manajemen aset pertama kali dicetuskan oleh industri privat

(Lukman dan Akbar, 2010). Penerapan konsep manajemen aset telah terbukti memberikan hasil positif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan sektor privat. Kesuksesan sektor privat ini mulai dilirik oleh aparat pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik. Konsep manajemen aset mulai dikenali sebagai suatu cara yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola aset-aset yang dimiliki. Konsep manajemen aset (Siregar, 2004) di dunia internasional telah berkembang cukup pesat. Namun di Indonesia, hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam empat tahap kerja, meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset. Keempat tahapan kerja manajemen aset pemerintah daerah ini saling berhubungan dan terintegrasi.

Inventarisasi (Republik Indonesia, 2007) adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventarisasi. Inventarisasi aset (Siregar, 2004) terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Inventarisasi aset merupakan suatu kegiatan melaksanakan pengaturan, pencatatan aset-aset, menyusun daftar aset yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris aset secara teratur, dan mengurus aset menurut ketentuan yang ada.

Legal audit merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum (Republik Indonesia, 2007). Pengamanan tersebut menitik beratkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan

pengambil alihan atau kalim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surta perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya. Legal audit (Siregar, 2004) merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

Penilaian barang milik daerah (Republik Indonesia, 2007) dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian barang (aset) berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah (aset) yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah. Penilaian adalah suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, mengetahui nilai kekayaan daerah, dan penetapan harga bagi aset yang ingin dijual (Siregar, 2004). Biasanya penilaian ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (Republik Indonesia, 2016) dilakukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian merupakan

usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan pekerjaan yang dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004).

Hipotesis penelitian ini meliputi:

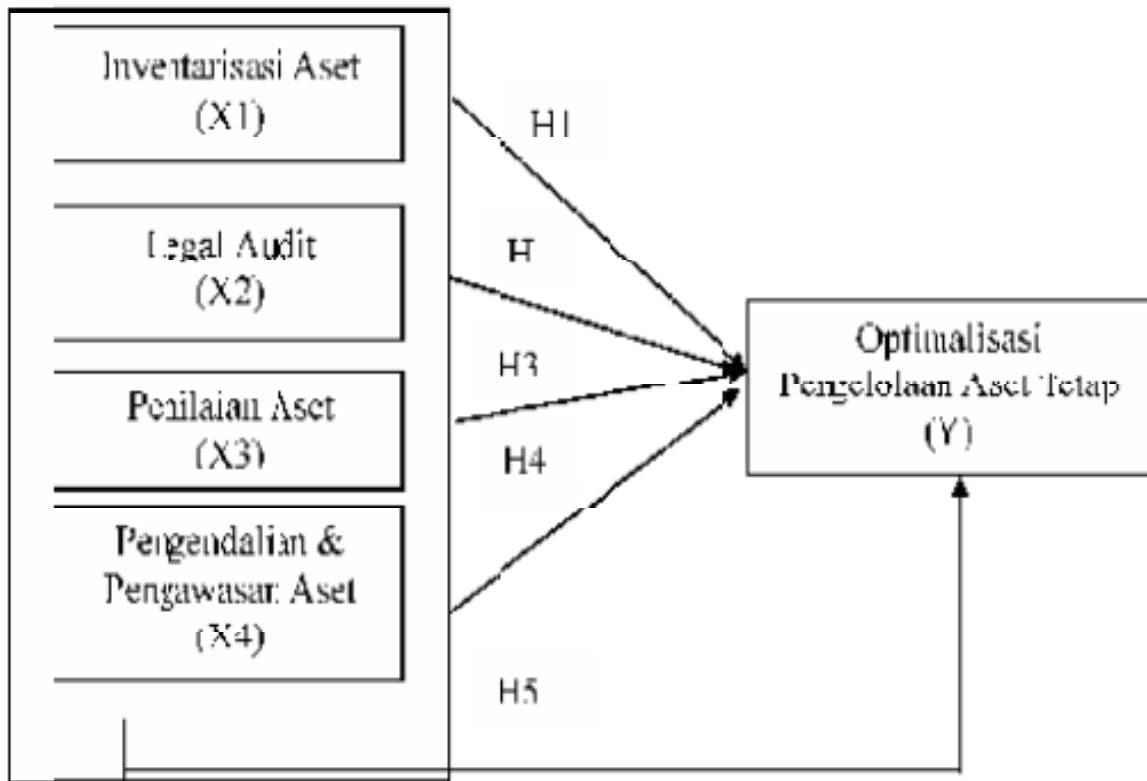
- H1 : Terdapat pengaruh inventarisasi aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap
- H2 : Terdapat pengaruh legal audit terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap
- H3 : Terdapat pengaruh penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap
- H4 : Terdapat pengaruh pengawasan dan pengendalian Aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap
- H5 : Terdapat pengaruh inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap

Kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 1.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada OPD dalam lingkup pemerintah kota Palembang. Data yang digunakan data primer. Teknik pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Penjelasan kriteria pengambilan sampel tersaji pada tabel 1.



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Responden		
		Kepala Dinas	Sekretaris	Staff Bagian Aset
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	6
2	Dinas Pendidikan	1	1	6
3	Dinas Pertanian	1	1	6
4	Dinas Tenaga Kerja	1	1	6
5	Dinas Perhubungan	1	1	6
6	Dinas Sosial	1	1	6
Total Penyebaran Kuisisioner		6	6	36

Variabel Penelitian

Operasionalisasi dan pengukuran variabel dependen dan independen disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Definisi
Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Y)		Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28).
	Inventarisasi Aset (X1)	Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian (Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 1)
	Legal Audit (X2)	Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum (Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 296).
	Penilaian Aset (X3)	Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah (Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 325).
Manajemen Aset (X)	Pengendalian dan Pengawasan Aset (X4)	Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 481 dan Pasal 482).

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala OPD, sekretaris OPD dan Staf Bagian Aset di BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial di Pemerintah Kota Palembang.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan regresi berganda, berbantuan software SPSS *for windows*. Hasil uji kualitas data, diperoleh semua nilai r-hitung untuk masing-masing pernyataan tentang inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengendalian dan pengawasan aset, serta optimalisasi pengelolaan aset tetap lebih besar dari r-tabel (0.361). Setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid. Koefisien

reliabilitas instrumen inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengendalian dan pengawasan aset, serta optimalisasi pengelolaan aset tetap antara lain 0,759 sampai 0,881. Semua nilai variabel menunjukkan koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,7, disimpulkan semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Uji hipotesis secara parsial (Uji t), uji hipotesis secara simultan (Uji F), dan uji koefisien determinasi (Uji R *Square*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Regresi Linier dapat dilihat dalam tabel 3. Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh untuk melihat pengaruh manajemen

aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap pemerintah kota Palembang, adalah:

$$\text{OPAT} = -5,514 + 0,590\text{IA} + 0,452\text{LA} + 0,582\text{PA} + 0,493\text{PPA} + e$$

Tabel 3
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.	Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T			Sig.	Toleranc e	VIF
(Constant)	-5.514	8.088		-.682	.499			
Inventarisasi Aset/IA (X1)	.590	.230	.296	2.564	.014	.977	1.024	
Legal Audit/LA (X2)	.452	.144	.363	3.140	.003	.972	1.029	
1 Penilaian Aset/PA (X3)	.582	.241	.279	2.416	.020	.973	1.027	
Pengendalian dan Pengawasan Aset (X4)	.493	.227	.251	2.175	.035	.980	1.020	

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap/OPAT (Y)

Sumber: *Output* dari SPSS.(2019)

Uji Hipotesis

Uji t-Statistik

Pengujian secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel independen: inventarisasi aset (X1), legal audit (X2), penilaian aset (X3), pengendalian dan pengawasan aset (X4) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil uji koefisien regresi secara parsial disajikan dalam tabel 4.4.

Jika *Prob.(t-Statistic)* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh. Sedangkan jika *Prob.(t-Statistic)* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

Uji F-Statistik

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen. Dalam pengujian simultan variabel independen ditetapkan ketentuan jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka hipotesis dapat diterima atau seluruh variabel independen (X1,X2,X3, X4) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen optimalisasi pengelolaan aset tetap (Y). Hasil uji koefisien regresi secara simultan tersaji pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	216.955	4	54.239	8.450	.000 ^b
Residual	276.024	43	6.419		
Total	492.979	47			

a. Dependent Variable: optimalisasi pengelolaan aset tetap (Y)

b. Predictors: (Constant), pengendalian dan pengawasan aset (X4), legal audit (X2), inventarisasi (X1), penilaian aset (X3)

Sumber: *Output* dari SPSS (2018)

F-hitung sebesar 8,450 lebih besar dari F-tabel 2,589, sehingga secara simultan variabel independen Inventarisasi Aset (X1), Legal Audit (X2), Penilaian Aset (X3) serta Pengendalian dan Pengawasan Aset (X4) secara bersama sama mempengaruhi secara signifikan variabel dependen Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada output *Model Summary* dari hasil analisis regresi berganda. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.388	2.534

a. Predictors: (Constant), pengendalian dan pengawasan aset (X4), legal audit (X2), inventarisasi (X1), penilaian aset (X3)

Sumber: *Output* dari SPSS. (2019).

Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,388, menginterpretasikan variabel X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 38,8% terhadap variabel Y. Sisanya 61,2% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} variabel inventarisasi aset sebesar 2,564 dan nilai signifikan 0,014 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,017. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap pemerintah kota Palembang.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (Republik Indonesia, 2016). Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventarisasi. Buku inventaris tersebut memuat data, meliputi lokasi, jenis/merk, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal

barang, dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangkai-pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang. inventarisasi aset terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain (Siregar, 2004). Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Penelitian ini sejalan dengan (Asman, Akram, & Alamsyah, 2016), (Mantoyob, Ratang, & Kambu, 2016) menyatakan inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan. Sedangkan (Antoh, 2017) menyatakan inventarisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Semakin diterapkannya kegiatan inventarisasi aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu unsurnya adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian aset dapat

mengoptimalkan pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan.

Pengaruh Legal Audit terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} variabel legal audit adalah sebesar 3,140 dan nilai signifikan 0,003 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,017. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} artinya H_0 diterima. Kondisi tersebut mengindikasikan legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap pemerintah kota Palembang. Hal ini mengandung.

Legal audit dipandang dapat mengeliminasi atau meminimalisasi resiko hukum atau menurunkan biaya perkara yang harus dikeluarkan karena diakibatkan oleh defisiensi/kekosongan dokumen-dokumen tertulis. Legal audit dipandang dapat mengeliminasi atau meminimalisasi resiko hukum atau menurunkan biaya perkara yang harus dikeluarkan karena diakibatkan oleh defisiensi/kekosongan dokumen-dokumen tertulis.

Legal audit (Republik Indonesia, 2016) merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitik beratkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surta perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

Legal audit merupakan satu lingkup kerja Manajemen Aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan asset (Siregar, 2004). Permasalahan legal sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset

dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

Legal audit berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan (Asman, Akram, & Alamsyah, 2016). Sedangkan (Jamaludin, 2017), menyatakan legal audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Semakin diterapkannya kegiatan legal audit yang salah satu unsurnya adalah kegiatan atau tindakan untuk memonitor aset yang dikuasai oleh pihak lain dan pemindahtanganan serta pengamanan aset. Kegiatan legal audit yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengoptimalkan pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan.

Pengaruh Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

Nilai t_{hitung} variabel penilaian aset adalah sebesar 2,416 dan nilai signifikan 0,020 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,017. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel penilaian aset memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap pemerintah kota Palembang. Hal ini mengandung arti bahwa H_0 diterima.

Hasil penelitian ini didukung (Republik Indonesia, 2016), penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian barang (aset) berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah (aset) yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah (aset).

Penilaian adalah suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual (Siregar, 2004). Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan,

dilakukan dengan sestimasi terendah dengan menggunakan Nilai Jual Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

Penilaian aset (Asman, Akram, & Alamsyah, 2016) berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan. Sedangkan (Antoh, 2017) menyatakan inventarisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Semakin diterapkannya kegiatan penilaian aset yang salah satu unsurnya adalah kegiatan atau tindakan penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset dapat mengoptimalkan pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan.

Pengaruh Pengendalian dan Pengawasan Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

Nilai t_{hitung} variabel pengendalian dan pengawasan aset adalah sebesar 2,175 dan nilai signifikan 0,035 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,017. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian dan pengawasan aset memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap pemerintah kota Palembang. Hal ini mengandung arti bahwa H_0 diterima.

Temuan ini didukung oleh (Republik Indonesia, 2016), pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA,

transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004). Dengan adanya SIMA setiap penanganan terhadap satu aset termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah.

Pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan (Asman, Akram, & Alamsyah, 2016). Artinya semakin diterapkannya pengendalian dan pengawasan aset yang salah satu unsurnya adalah kegiatan atau tindakan melakukan pengawasan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan aset yang baik dapat mengoptimalkan pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan.

Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian Aset, serta Pengendalian dan Pengawasan Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

Hasil analisis kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar 0,44. Nilai ini berarti sebesar 44% variabel mengenai Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang dipengaruhi oleh pengendalian dan pengawasan aset sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil penelitian ini mengindikasikan inventarisasi, legal audit, penilaian aset, serta pengendalian dan pengawasan aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Mantoyob, Ratang, & Kambu, 2016), (Asman, Akram, & Alamsyah, 2016), dan (Pratama & Pangayow, 2016). Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset (Siregar, 2004) merupakan tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan pengelolaan aset-aset yang dimiliki. Semua tahapan manajemen aset ini, jika dijalankan dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam

mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara parsial inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di pemerintah Kota Palembang. Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengendalian dan pengawasan aset berpengaruh secara bersama-sama terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di pemerintah Kota Palembang.

Saran

Kepala OPD, Sekretaris, dan Staf bagian aset diharapkan mampu berperan secara aktif dalam inventarisasi aset dan mengoptimalkan pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan serta aset yang tidak diketahui keberadaannya dapat segera ditemukan. Aset dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah apabila aset tersebut dapat dioptimalkan. Diharapkan juga mampu berperan secara aktif dalam legal audit. Bukti legal atas aset yang dimiliki oleh pemerintah, akan lebih membantu dalam pengamanan aset, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset tetap khususnya tanah dan bangunan. Berperan secara aktif dalam penilaian aset, dalam hal ini penilaian aset digunakan untuk menilai aset yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyusun neraca serta dapat mengukur nilai jual aset pemerintah, agar sesuai dengan nilai wajar aset tersebut. Pemerintah Kota Palembang juga turut berperan secara aktif dalam pengendalian dan pengawasan aset, dikarenakan Kepala OPD sebagai pihak yang bertanggungjawab atas aset yang dimiliki oleh setiap OPD. Sebagai pengguna aset, tindakan pengendalian dan pengawasan aset ini dapat menilai apakah aset tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan 38.8% dari variabel dependen. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain, seperti optimalisasi aset, pengamanan aset dan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Selain itu

dapat memilih objek penelitian yang lebih luas dan memperbanyak sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh, E. A. (2017). Pengaruh Manajemen Aset dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai). *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1(2), 37-47.
- Asman, A., Akram, A., & Alamsyah, M. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets-Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Badan Pemeriksa KeLaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Fahmi. (2015). *www.AMPERA.CO*. Retrieved Mei 2019, from <http://www.AMPERA.CO/baca/pemerintah-kota-palembang-mendata-ulang-aset-kepemilikan.html>
- Jamaludin. (2017, September). Pengaruh inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan). *Jurnal Sekuritas Manajemen Keuangan*, 1(1).
- Mantoyob, P. F., Ratang, W., & Kambu, A. (2016). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *Keuda-Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1(2), 83-109.
- Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016, November). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Jayakarta). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 33-51.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Aset Tetap. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Permendagri No. 19 Tahun 2016 (pembaruan Permendagri No. 17

- Tahun 2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. Jakarta.
- Sangadji, S. M. (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Legal Audit dan Penilaian Aset (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(1), 41-62.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen aset, strategi penanataan konsep pembangunan berkelanjutan secara Nasional dalam konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada era globalisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.